

Pelopor Kesetaraan Gender Dalam Agama Buddha: Maha Prajapati Gotami

Fingky Angelina^{*1}, Muta Ali Arauf²

^{*1}Program Studi Agama-Agama, Universita Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, Indonesia

²Dosen Pengampuh Program Studi Agama-agama, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fingkyangelina02@gmail.com

(Naskah masuk: 03 Maret 2025, diterima: 21 April 2025, diterbitkan: 24 April 2025)

Abstract

Keywords:

Maha Prajapati
Gotami, Gender
Equality, Agama
Buddha

This research discusses the role of Maha Prajapati Gotami as a pioneer of gender equality in Buddhism. As the adoptive mother of Siddhartha Gautama (the Buddha), Maha Prajapati Gotami was the first woman to be ordained as a Bhikkhuni. This research uses historical methods to trace her role and contribution in the formation of the Bhikkhuni community. The results show that although Maha Prajapati Gotami succeeded in obtaining the Buddha's approval to establish the Bhikkhuni Sangha, the existence of the Garudhamma rule shows the inequality of position between Bhikkhunis and Monks. Nonetheless, the establishment of the Bhikkhuni Sangha became an important milestone in the history of gender equality in Buddhism. This study contributes to broadening the understanding of the role of women in the early history of Buddhism and its relevance in the discourse of gender equality today.

Abstrak

Kata kunci:

Maha Prajapati
Gotami,
Kesetaraan
Gender, Agama
Buddha

Penelitian ini membahas peran Maha Prajapati Gotami sebagai pelopor kesetaraan gender dalam agama Buddha. Sebagai ibu angkat dari Siddhartha Gautama (Sang Buddha), Maha Prajapati Gotami merupakan perempuan pertama yang ditahbiskan sebagai Bhikkhuni. Penelitian ini menggunakan metode historis untuk menelusuri peran dan kontribusinya dalam pembentukan komunitas Bhikkhuni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Maha Prajapati Gotami berhasil memperoleh persetujuan Sang Buddha untuk mendirikan Bhikkhuni Sangha, keberadaan aturan Garudhamma menunjukkan adanya ketimpangan kedudukan antara Bhikkhuni dan Bhikkhu. Meskipun demikian, pendirian Bhikkhuni Sangha menjadi tonggak penting dalam sejarah kesetaraan gender dalam agama Buddha. Kajian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang peran perempuan dalam sejarah awal agama Buddha serta relevansinya dalam wacana kesetaraan gender di masa kini.

Pendahuluan

Laki-laki dan perempuan adalah entitas yang paling terhormat. Variasi antara laki-laki dan perempuan ada dalam aspek biologis. Namun dalam konteks sosial maupun kultural laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara (Fadhilah, 2015). Diskusi mengenai pria dan wanita tentunya menjadi topik yang sangat diperdebatkan. Meskipun dalam konteks keagamaan terdapat perselisihan antara pria dan wanita, hal ini tidak mengurangi praktik religius di antara kedua jenis kelamin. Manusia adalah makhluk sosial dan pengikut suatu kepercayaan. Secara universal, manusia terdiri dari sekelompok individu, baik pria maupun wanita, yang bersatu dalam menjalani kehidupan beragama (Fadhilah, 2015).

Pada dasarnya, ajaran agama membahas hubungan antara pria dan wanita. Namun, perbedaan sosial antara keduanya banyak dipengaruhi oleh budaya yang ada dalam tradisi setempat. Sebagai contoh, di lokasi-lokasi dengan tradisi patriarki seperti di Arab, atau sistem kasta dalam agama Hindu. Pada periode jahiliyah, anak perempuan dipandang sebagai aib bagi sebuah keluarga dan budak perempuan sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil, dianggap sebagai makhluk yang lemah. Hal ini menciptakan pandangan bahwa posisi perempuan berada di bawah pria. (Fadhilah, 2015). Menurut Sebagian tradisi agama dunia, Perempuan seringkali diberi peran subordinasi yakni suatu kelompok atau seseorang yang memiliki kuasa atas seorang wanita.

Tidak dapat dipisahkan dari ajaran keagamaan dan pandangan para ahli agama, faktor yang sangat nyata dan paling fundamental adalah budaya serta tradisi yang ada di tempat agama tersebut berkembang. Dengan demikian, melalui tradisi sering kali muncul diskriminasi yang merugikan perempuan, yang menganggap wanita itu lemah. Tidak hanya dalam doktrin dan kepercayaan, wanita juga sering menerima perlakuan diskriminatif baik di lembaga keagamaan maupun di institusi lainnya. Sistem kasta dan patriarki memperlakukan perempuan seolah-olah mereka adalah golongan rendah dan hamba (Arvind Sharma, 2006).

Agama Buddha, dalam konteks normatif, dapat dikategorikan sebagai "Agama Bumi" yang membawa ajaran bersifat humanis. Agama ini dikenal karena fokusnya pada etika dan interaksi sosial, lebih daripada pengajaran yang terpusat pada prinsip-prinsip tertentu. Namun, sifat humanis dari ajaran Agama Buddha tidak selalu memastikan bahwa agama ini memberikan hak, posisi, dan peran yang sama bagi perempuan sebagaimana halnya dengan laki-laki (Effendi, 2004). Ada beberapa alasan mengapa manusia memerlukan agama, yang mana agama berfungsi sebagai kebutuhan spiritual bagi manusia sepanjang waktu. Alasan yang pertama adalah hasrat untuk menemukan sesuatu yang sempurna, kedua adalah kecintaan manusia terhadap kehidupan yang lebih baik, ketiga adalah dorongan untuk mencapai kehormatan, keempat adalah perkembangan jiwa manusia seiring bertambahnya usia, dan kelima adalah naluri alami dari jiwa manusia untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan (Sofiana, 2019)

Saat ini, kita dapat melihat banyak wanita yang mengambil peran sebagai pemimpin, baik sebagai pemimpin negara maupun dalam konteks kepemimpinan spiritual. Salah satu contoh dalam tradisi Buddha adalah Maha Prajapati Gotami yang memimpin

sangha selama masa hidup Buddha atau pada zaman sekarang ini (Sofiana, 2019). Buddha mengakui konsep gender karena secara umum dan alami, semua manusia memiliki derajat yang setara, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam hal hak dan kewajiban. Pandangan ini menjadi suatu argumen yang mulia yang disampaikan oleh Sang Buddha, terutama mengingat pada masa lalu terdapat tekanan besar dari kelompok Brahmana yang menolak perempuan di India, yang sudah menjadi bagian dari budaya. Oleh karena itu, Sang Buddha dengan tegas mengangkat derajat wanita, bukan hanya sebagai sebuah keputusan yang suci, melainkan untuk membantu mereka yang dihadapkan pada situasi sebagai budak dan jauh dari harapan moral yang indah dari Dharma. Buddha tidak melihat adanya perbedaan berdasarkan gender, kasta, atau perbedaan lainnya (Taram & Jimo, 2021).

Agama Buddha sangat menekankan etika dan moralitas. Di dalam agama ini, tidak ada konsep kasta. Menurut ajaran Buddha, semua individu itu setara dan tentunya memiliki hak serta kewajiban yang serupa tanpa perbedaan. Ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Sang Buddha, peningkatan posisi perempuan bukan hanya sekadar keputusan sakral, tetapi juga untuk membantu perempuan yang diperlakukan sebagai budak.

Sang Buddha juga tidak mengakui adanya perbedaan gender, kasta, atau perbedaan lainnya. Salah satu tokoh yang menjadi pelopor kesetaraan gender dalam agama Buddha adalah Maha Prajapati Gotami. Maha Prajapati Gotami adalah saudara perempuan dari ibu Siddharta Gautama atau Sang Buddha. Setelah ibunya meninggal, Maha Prajapati Gotami mengambil alih peran sebagai ibu angkat dan merawat Siddharta Gautama. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengupas tentang kontribusi Maha Prajapati Gotami dalam perjuangan untuk kesetaraan gender dalam Agama Buddha serta bertujuan untuk menganalisis perannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di komunitas Buddhis.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul Pelopor Kesetaraan Gender Dalam Agama Buddha: Maha Prajapati Gotami adalah metode historis. Metode ini bertujuan untuk merekonstruksi dan menganalisis peran Maha Prajapati Gotami dalam perjuangan kesetaraan gender di komunitas Buddhis awal. Metode yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni pengumpulan sumber, interpretasi dan historiografi. Mengumpulkan *ata* dari sumber primer seperti *Vinaya Pitaka* yang mencatat perjuangan Maha Prajapati Gotami dalam mendirikan Bhikkhuni Sangha, serta *Sutta Pitaka* yang berisi ajaran Buddha terkait perempuan dan kehidupan monastik. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, dimana teks-teks Buddhis dianalisis dalam konteks sosial dan budaya India kuno untuk memahami bagaimana peran perempuan diakomodasi dalam struktur monastik awal. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam bentuk historiografi yang sistematis, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perjuangan Maha Prajapati Gotami dalam membangun komunitas Bhikkhuni berdampak terhadap perkembangan kesetaraan gender dalam Agama Buddha hingga era modern. Dengan menggunakan metode historis ini peneliti berharap dapat memberikan wawasan

mengenai kontribusi perempuan dalam sejarah agama Buddha serta relevansinya dalam kesetaraan gender

Hasil dan Pembahasan

Menurut catatan sejarah, agama Buddha muncul dan tumbuh sekitar abad ke-6 SM di wilayah India. Agama Buddha muncul sebagai respon terhadap praktik-praktik ritual dalam agama Hindu. Kehadiran agama Buddha jelas memiliki koneksi yang kuat dengan agama Hindu. Di era Brahmanisme, terdapat banyak bentuk ketidakadilan dan diskriminasi, baik dalam sistem kasta maupun terhadap perempuan (Sofiana, 2019). Kata Buddha berasal dari akar kata Bodhi yang bearti hikmat atau juga bearti yang mendapatkan pencerahan. Sang Buddha sendiri di nisbahkan kepada Siddharta Gautama (Ismail, 2016).

Buddha mengakui gagasan gender karena pada dasarnya manusia memiliki kedudukan yang setara, baik pria maupun wanita, dalam hak dan martabat. Ajaran Buddha ini bisa dianggap sebagai sebuah argumentasi suci, terutama mengingat masa lalu ketika masyarakat Hindu memberikan tekanan yang besar kepada perempuan di India. Pada saat itu, norma budaya di India sangat kuat dalam memposisikan wanita sebagai pendukung atau bahkan sebagai hamba bagi kaum pria. Dengan munculnya pemikiran Buddha, nilai-nilai budaya ini mulai berkurang, karena secara moral bertentangan dengan harapan Dharma yang penuh dengan keindahan (Taram & Jimo, 2021). Perlahan demi perlahan wanita mulai mengambil peran dalam kehidupan sosial. Meskipun Agama Buddha menerima adanya konsep kesetaraan, pada awal pembentukan Sangha Bhikkhu tidak langsung di setujui oleh Sang Buddha, karena ada beberapa alasan. Salah satu tokoh dalam Agama Buddha yang menjadi pelopor pertama dalam memeprijuangkan kesetaraan gender dan pembentukan Sangha Bhikkhuni yakni Putri Maha Prajapati Gotami ibu tiri dari Siddharta Gautama atau dikenal dengan Sang Buddha.

A. Biografi Maha Prajapati Gotami

Maha Prajapati Gotami adalah ibu tiri dari Siddharta Gautama atau Sang Buddha. Setelah meninggalnya Putri Mahamaya ibu dari Siddharta Gautama Maha Prajapati Gotami lah menggantikan peran sebagai ibu serta merawat dan membesarkannya (Mahathera et al., 2015a). Setelah Siddharta menjadi Buddha, banyak pangeran dan kerabat yang memutuskan untuk menjadi Bhikkhu. Mereka meninggalkan keluarga dan kehidupan rumah tangga, yang menjadikan istri-istri mereka berstatus janda. Pada waktu itu, para wanita tidak terpikir untuk menjadi Bhikkhuni. Namun, setelah Raja Suddhodana meninggal, permaisuri Maha Prajapati Gotami mengajak para wanita untuk bertemu Sang Buddha dan menjadi Bhikkhuni. Mereka merasa tidak ada lagi manfaat mempertahankan kehidupan berumah tangga dan juga tidak ingin mencari suami baru. Ketika Siddharta Gautama berkunjung ke Kapilavatthu setelah mencapai kebuddhaan, Maha Prajapati Gotami datang untuk menemui Sang Buddha dan meminta agar wanita juga diizinkan menjadi bagian dari pasamuhan bhikkhuni (Hemajayo, 2017), ia berkata:

"Bhante, saya mohon agar Bhante berkenan memberi upasampada pada para wanita menjadi pabbajita dalam Dharma Vinaya yang Tathagata telah babarkan".

Namun Sang Buddha menolak dengan berkata:

"Wahai Gotami, janganlah merasa senang bahwa para wanita meninggalkan kehidupan berumah tangga dan upasampada sebagai pabbajita dalam Dhamma Vinaya yang Tathagata telah babarkan".

Tiga kali Maha Prajapati Gotami mengulang permohonannya, namun Sang Buddha tetap saja menolak dengan jawaban yang sama, maka dari itu Maha Prajapati Gotami merasa berkecil hati dan kecewa sehingga air matanya berlinang dan berpamitan pada Sang Buddha. Akan tetapi meskipun ada penolakan dari sang Buddha, namun Maha Prajapati Gotami tidak menyerah begitu saja. Ketika Buddha mengembara meninggalkan Kapilavastu menuju kota Vesali, ternyata Maha Prajapati Gotami mengikutinya. Bukan hanya itu Maha Prajapati Gotami juga mencukur dan memakai jubah petapa bersama para janda suku Sakya yang suaminya telah menjadi Bhikkhu.

Melihat terjadinya peristiwa ini Bhikkhu Ananda datang menghampiri dan bertanya:

"Wahai ibu Gotami, mengapa ibu sampai berlinang air mata dengan telapak kaki membengkak dan mengenakan jubah pertapa yang penuh dengan debu?".

Lalu Maha Prajapati Gotami menjawab:

"... ya, Ayasma Ananda saya berbuat begini karena Tathagata telah menolak memberi upasampada pada wanita sebagai pabbajita dalam Dhamma Vinaya".

Mendengar hal tersebut Bhikkhu Ananda berkata:

"Kalau demikian, tunggulah ibu disini saya akan menghadap memohon agar beliau mengizinkan wanita upasampada dalam Dhamma Vinaya".

Lalu Bhikkhu Ananda pun masuk menemui Buddha setelah menghormat dan mengambil tempat yang layak, ia berkata"

"Bhante, permaisuri Maha Prajapati Gotami dengan kedua telapak kaki membengkak, badan penuh dengan debu, berduka, kecewa, air mata yang berlinang berdiri di luar karena Tathagata tidak mengizinkan wanita upasampada sebagai pabbajita. Saya mohon izinkanlah wanita upasampada sebagai pabbajita dalam Dhamma Vinaya yang telah Tathagata babarkan".

Akan tetapi Buddha menolak dengan berkata:

"Ananda, janganlah merasa senang bahwa wanita meninggalkan kehidupan berumah tangga dan upasampada menjadi pabbajita dalam Dharma Vinaya yang Tathagata telah babarkan".

Dalam hal ini Bhikkhu Ananda mengulang permohonannya sebanyak tiga kali, namun Sang Buddha menolak dengan jawaban yang sama, maka dari itu Bhikkhu Ananda berfikir, bagaimana caranya agar Buddha berkenan mengizinkannya, lalu terjadilah tanya jawab antara Buddha dan Bhikkhu Ananda. Melalui tanya jawab tersebut akhirnya Sang Buddha menjelaskan *"Ananda, bila putri Maha Prajapati Gotami mau menerima delapan garudhamma, maka bearti ia telah upasampada sebagai pabbajita"* (Bhikkhuni) (Hemajayo, 2017):

1. Bhikkhuni harus hormat kepada Bhikkhu
2. Bhikkhuni tidak boleh bervassa di tempat yang tidak ada Bhikkhu
3. Bhikkhuni harus mendengarkan Dharma dari Bhikkhu setiap tengah bulan
4. Bhikkhuni setelah melakukan vassa, harus melakukan pavarana dalam Sangha Bhikkhu dan Sangha Bhikkhuni
5. Bhikkhuni harus melakukan pembersihan diri pada Sangha Bhikkhu dan Sangha Bhikkhuni
6. Bhikkhuni harus diupasampada dalam Sangha Bhikkhu dan Sangha Bhikkhuni
7. Bhikkhuni tidak boleh berkata kasar pada seorang Bhikkhu
8. Bhikkhuni tidak boleh mengajar Bhikkhu.

Setelah mendengar itu semua Bhikkhu Ananda pergi menemui Maha Prajapati Gotami untuk mengajukan *upasampada*. dan ternyata Maha Prajapati Gotami menerima delapan syarat tersebut. Lalu Bhikkhuni Gotami menghadap Sang Buddha setelah menghormat dan mengambil tempat yang layak, ia bertanya:

"Bhante, selanjutnya apa yang harus saya perbuat terhadap para wanita yang mengikuti saya".

Sang Buddha menjawab dengan penjelasan Dhamma. Kemudian memerintahkan para Bhikkhuni untuk meng-*upasampada* para wanita itu untuk menjadi Bhikkhuni, setelah itu Bhikkhuni Maha Prajapati Gotami berpamitan pergi dan para wanita pun melakukan *upasampada* yang dilakukan oleh Bhikkhu untuk menjadi Bhikkhuni atas perintah dari Sang Buddha. Akan tetapi setelah para wanita melakukan *upasampada* oleh para Bhikkhu mereka bertanya kepada Bhikkhuni Gotami, kenapa ibu Gotami belum di *upasampada* menjadi seorang Bhikkhuni. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Bhikkhuni Gotami menjadi ragu dan bertanya pada Ayasma Ananda, dan Bhikkhu Ananda pun menghadap Sang Buddha untuk menanyakan hal tersebut. Berkaitan dengan hal ini Sang Buddha menegaskan kembali " wahai Ananda, Putri Maha Prajapati Gotami telah menerima delapan garudhamma, saat itulah ia telah *upasampada* menjadi seorang Bhikkhuni" (Mahathera et al., 2015b).

Sejarah munculnya Sangha Bhikkhuni ada beberapa tahap perubahan *upasampada* Bhikkhuni. Pertama, ketika melakukan *upasampada* dilakukan sendiri oleh Sang Buddha dengan memberikan garudhamma kepada putri Maha Prajapati Gotami. *Upasampada* ini dilakukan secara khusus oleh Sang Buddha kepada Putri Maha Prajapati Gotami dan tidak melakukannya pernah melakukannya lagi pada wanita lain. Kedua, atas perintah Sang Buddha para bhikkhu melakukan *upasampada* kepada para wanita. Ketiga, setelah Sangha Bhikkhuni terbentuk, *upasampada* dinamakan dilakukan pada dua Sangha yakni Sangka Bhikkhu dan Sangha Bhikkhuni, sesuai dengan garudhamma yang harus dipatuhi oleh Bhikkhuni seumur hidup. *Upasampada* ini dilakukan semasa Sang Buddha masih hidup hingga Parinibbana dan sesudahnya.

Ketika Sang Buddha menerima Putri Maha Prajapati Gotami menjadi Bhikkhuni ada delapan syarat yang diajukan, jika dilihat secara garis besar, dalam delapan syarat ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi para wanita, akan tetapi dalam maksud delapan syarat ini untuk mengingatkan ketika para wanita telah menjadi Bhikkhuni mereka tetap harus menghormati para bhikkhu. Ketika ada seorang Bhikkhuni sudah lama atau lebih senior dan ada seorang Bhikkhu yang bisa dikategorikan baru, tetap

saja dalam hal ini seorang Bhikkhuni tetap harus menghormati Bhikkhu yang baru. Karena dalam hal ini dalam proses menjadi Bhikkhuni sedikit rumit

B. Hak Asasi Manusia Dalam Agama Buddha

Sejak dalam kandungan seseorang telah mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, tidak bersumber dari suatu kedudukan atau kewajiban tertentu. Setiap manusia memiliki hak-hak yang sama, baik dari segi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian (Mahathera et al., 2015a). HAM menyangkut hubungannya dengan manusia maupun dengan lingkungan sekitar, jika lingkungan rusak tentunya akan membahayakan manusia. Dalam hal ini agama Buddha sangat peduli terhadap lingkungan, dalam nasihat Sang Buddha dalam Culasila, Digha Nikaya, agar manusia tidak merusak tanaman dan lingkungan. Ini adalah bukti bahwa agama Buddha sangat peduli terhadap lingkungan dan bentuk kehidupan makhluk sekecil apapun itu (Mahathera et al., 2015a).

Manusia harus memiliki kebebasan dalam dirinya sehingga persoalan HAM dapat didudukkan pada proposisi yang sebenarnya yakni kebebasan dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, karena dalam penegakan HAM tidak dipengaruhi dengan unsur kebencian dan permusuhan. Dalam penegakan HAM ada Pancasila Buddha yang tentunya berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.

Tabel 1.1 Sila Pancasila Buddhis dan Hak Asasi Manusia

Sila	Butir Sila	Butir HAM
1	Menghindari membunuh	Melindungi hak untuk hidup
2	Menghindari mencuri	Melindungi hak untuk melindungi harta miliknya
3	Menghindari berbuat asusila	Melindungi hak untuk hidup harmonis
4	Menghindari berkata salah	Melindungi hak tentang kebenaran
5	Menghindari barang/minuman yang memabukkan	Melindungi hak untuk hidup tenang dan damai

C. Agama Buddha dan Kesetaraan Gender

1. Pengertian Gender

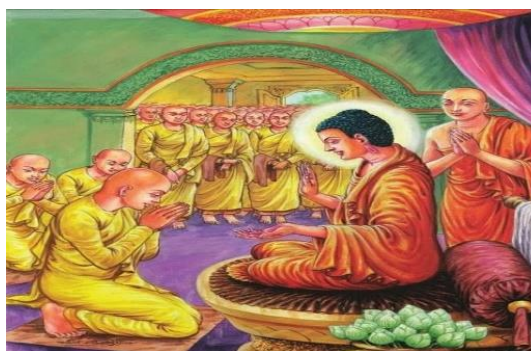
Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan Perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya. Perbedaan ini tentunya menjadi sangat penting karena sering kali perbedaan antara laki-laki dan perempuan mencampur adukan ciri-ciri manusia yang sifatnya kodrati dan sifatnya yang bukan kodrati (Kartini & Maulana, 2019). Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin". Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrati memang diakui adanya perbedaan antara laki-laki dan Perempuan yaitu pada aspek biologis, perbedaan biologis ini merupakan aspek yang tidak dapat ditukar dan sifatnya mutlak atas ciptaan Tuhan. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan seringkali digunakan untuk menentukan dalam relasi gender seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi dalam masyarakat (Kartini & Maulana, 2019). Istilah gender seringkali di kaitkan

dengan perempuan, padahal istilah gender bukan hanya menyangkut perempuan saja akan tetapi istilah gender mencakup baik itu laki-laki maupun perempuan (Azisah et al., 2016). Hal-hal yang selalu dikaitkan dengan gender selalu ditunjukkan untuk kaum perempuan sebagai kelompok yang lebih tertinggal dari laki-laki seperti dalam proses pengambilan Keputusan, baik itu dalam sistem tata pemerintahan maupun dalam keluarga.

2. Kesetaraan Dalam Agama Buddha

Agama Buddha lahir sebagai perlawanan atas dominasi paham Brahmanisme di India yang saat itu menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder, dimana perempuan dalam paham Brahmanisme dilarang melakukan peribadatan. Munculnya Buddha bukan hanya membebaskan dari sistem kasta, akan tetapi juga pembebasan terhadap gender (Kumari, 2022). Agama Buddha memberikan kedudukan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, agama Buddha juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai kemuliaan spiritualitas tertinggi dengan menjadi Bhikkhuni (Kumari, 2022).

Di dalam agama Buddha dikenal “kesetaraan” antara laki-laki dan perempuan. Dalam pencapaian pembebasan kesengsaraan Sang Buddha tidak membedakan jenis kelamin, Sang Buddha juga mengatakan bahwa perempuan juga dapat lebih baik dari pada laki-laki, istilah yang sering dikatakan Sang Buddha “*matugama*” yang berarti “ibu rakyat” atau “*perhimpunan kaum ibu*”, dalam hal ini menggambarkan bahwa besarnya peran seorang perempuan. Sang Buddha juga membukakan pintu bagi perempuan untuk mencapai kesucian, yakni Sang Buddha menerima bibinya yaitu Prajapati Gotami. Prajapati Gotami juga merupakan pelopor kesetaraan gender yang ada pada agama Buddha (Mahathera et al., 2015a).



Gambar 1.1 Kesetaraan Dalam Agama Buddha

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Maha Prajapati Gotami memiliki peran penting dalam perjuangan kesetaraan gender dalam Agama Buddha, terutama pada pendirian komunitas Bhikkhuni Sangha. Maha Prajapati Gotami bukan hanya sekedar sebagai ibu angkat Siddharta Gautama atau Sang Buddha akan tetapi juga sebagai tokoh revolusioner yang memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan spiritual. Meskipun begitu ada beberapa aturan dalam *garudhamma* memberikan batasan kedudukan Bhikkhuni dibandingkan Bhikkhu. Meskipun dengan demikian pendirian komunitas Bhikkhuni menjadi

tonggak kesetaraan gender dalam Agama Buddha. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman historis mengenai Maha Prajapati Gotami dalam Agama Buddha. Akan tetapi wacana tentang kesetaraan gender ini masih menjadi isu yang sangat penting, sehingga memberikan kesadaran kepada perempuan untuk menjaga nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan Sang Buddha.

Daftar Pustaka

- Arvind Sharma, *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*, Yogyakarta: Suka Press, 2006.
- Azisah, S., Mustari, A., Himayah, & Masse, A. (2016). Konstektualisasi Gender Islam dan Budaya. In *Buletin Al-Turas*. Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makasar. <https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>
- Effendi, R. A. (2004). 222986-Refleksi-Filosofis-Terhadap-Gender-Dalam. *Refleksi Filosofis Terhadap Relasi Jender Dalam Agama Buddha (Studi Atas Kitab Aganna Sutta)*, 38(3).
- Fadhilah. (2015). Gender dalam Agama Buddha (kajian terhadap aliran buddha maitreya di yogyakarta). *skripsi fakultas ushuluddin dan pemikiran islam universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta*.
- Hemajayo, S. (2017). *Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Ismail. (2016). *sejarah agama-agama*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefedensi Gender dan Seks. *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12(2), 217-239.
- Kumari, F. (2022). Kesetaraan Gender dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata. *Muadalah*, 10(2), 65.
<https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i2.7471>
- Mahathera, N. S., Priastana, J., Wiryanto, & Salim, I. (2015a). *Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Mahathera, N. S., Priastana, J., Wiryanto, & Salim, I. (2015b). *Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud, Jakarta.
- Sofiana, M. (2019). Peran Perempuan Dalam Agama Buddha. *skripsi fakultas ushuluddin dan filsafat universitas islam negeri ar-raniry darussalam banda aceh*, 1-89.
- Taram, & Jimo. (2021). *pendidikan agama buddha dan budi pekerti*. pusat perbukuan badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi kompleks kemdikbudristek, jakarta selatan.
<https://buku.kemdikbud.go.id>